

PPI Jepang Kritik Keras RUU TNI: Kami Khawatir Mahasiswa di Luar Negeri Enggan Kembali

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 16/03/2025



ORINEWS.id – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang ikut mengkritik proses pembahasan revisi UU TNI. Pembahasan yang dilakukan hotel mewah dan terkesan tertutup, dinilai menjadi indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan dari perubahan pasal dalam rancangan UU tersebut.

“Terlepas dari manfaat yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, dan perkembangan teknologi militer global. Kami rasa RUU (TNI) ini akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalui potensi pengembalian dwifungsi TNI melalui perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif,” ujar Prima Gandhi, Ketua Umum PPI Jepang, di Tokyo, dalam keterangannya, Ahad (16/3/2025).

Gandhi menegaskan, PPI Jepang sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Jepang, negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan parlementer, mendukung KontraS dan Koalisi Masyarakat Kritisi Proses

Legislasi Revisi UU TNI.

“Bila demokrasi dan penegakan HAM tidak terjamin di Tanah Air, kami mengkhawatirkan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri khususnya di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, ketika lulus nanti enggan balik ke Indonesia bahkan pindah warga negara (brain drain). Padahal Indonesia membutuhkan mereka untuk membangun bangsa,” ucap pria yang sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Tokyo University of Agriculture ini.

PPI Jepang menuntut agar pemerintah dan DPR membuat naskah akademis terkait urgensi revisi UU TNI. Jika sudah dibuat, kata Prima, berikan ruang kepada publik untuk mengkaji naskah akademis tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

Pada Sabtu (15/3/2025), proses legislasi revisi RUU TNI menimbulkan polemik. KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Rapat revisi UU TNI selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Gandhi menyatakan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan DPR RI di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.

“Harusnya seluruh Kementerian dan anggota DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden [Prabowo](#) dengan aksi nyata jangan hanya dengan kata-kata,” ujar dia. [source: *republika*]